

**RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP PERUSAHAAN
OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MALANG**
(Studi Implementasi Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S.
94–DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit)

Melissa Ivana

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia berkedudukan di Kabupaten Malang. Penulis hendak meneliti tahap-tahap restrukturisasi kredit, hambatan, dan upaya tentang Restrukturisasi Kredit.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S.94–DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia meliputi tahap-tahap yaitu prakarsa restrukturisasi kredit, negosiasi, analisis dan evaluasi, putusan restrukturisasi, dokumentasi restrukturisasi, dan monitoring. Adapun materi yang direstrukturisasi terhadap debitur yaitu perubahan tingkat suku bunga, penjadwalan kembali dan pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku Hambatan maupun upaya dalam restrukturisasi kredit adalah didalam setiap tahapan restrukturisasi kredit tersebut.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit

ABSTRACT

This article discussing the process of restructuring credit by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch of Kawi Malang against autobus companies Putra Mulia domiciled in Malang. Writer will examine stages restructuring credit, barriers, and effort of restructuring credit. Based on decree directors PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch of Kawi Malang NO:S.94–DIR/ADK/12/2005

dated 30 December 2005 about restructuring credit. Restructuring credit is an effort improvements conducted by bank in lending activities against a debtor who have trouble to meet their obligations. The implementation of restructuring credit held by PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch of Kawi Malang against autobus companies Putra Mulia covering stages that is restructuring credit initiatives, negotiation, analysis and evaluation, judgment restructuring, documentation restructuring, and monitoring. The material in restructuring against a debtor that is change interest rates, rescheduling and management/takeover asset debtor based on regulation. Obstacles and efforts in its restructuring credit is in every stage of restructuring credit.

Key Words: Restructuring Credit

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, termasuk peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan.

Pelaksanaan pembangunan ini tentunya membutuhkan dana yang di dapatkan dari berbagai sumber yang ada. Salah satunya seperti dana dari lembaga keuangan,¹ bank yang pada umumnya direalisasikan dalam bentuk pemberian kredit dan penanaman modal langsung kepada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah maupun swasta.

Salah satu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dimana di dalam Pasal 3 (tiga) dijelaskan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dengan demikian bank dapat menyalurkan dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat tersebut dalam bentuk pemberian kredit kepada

¹ Direksi. **Kajian Stabilitas Keuangan No. 10. Maret 2008.**
<http://www.scribd.com/doc/3974372/Bank-IndonesiaKajian-Stabilitas-Keuangan-No10-Maret-2008>,
2008, Diakses tanggal 2 September 2012 jam 13.20

masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut berhasil untuk dilakukan.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Ini berarti bahwa semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko tersebut jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank.

Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya suatu jaminan.

Seperti hal yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang, berdasarkan hasil pra survey yang telah penulis lakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang telah ditemukan suatu permasalahan hukum yaitu ketika debitur itu bergerak di bidang Perusahaan Jasa Angkutan Darat atau lebih dikenal dengan Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang.

Kemungkinan bagi debitur untuk melakukan wanprestasi (ingkar janji) masih tetap terbuka. Bentuk wanprestasi itu seperti kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada debitur dalam jumlah besar ternyata tidak dibayarkan kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi pinjaman pokok dan bunga yang menyebabkan kredit digolongkan ke dalam kualitas kredit macet. Sebelumnya dijelaskan di atas bahwa syarat perjanjian kredit yaitu adanya suatu jaminan, dalam hal ini debitur memberikan jaminan berupa asset debitur itu sendiri yaitu kendaraan (Bus) yang dibebani dengan dan jaminan fidusia dan jaminan berupa tanah bangunan yang dibebani dengan hak tanggungan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang pada awalnya melihat adanya prospek usaha yang baik bagi debitur, oleh karena itu pihak bank memberikan kesempatan guna upaya perbaikan kredit yaitu dengan melakukan restrukturisasi (penyelamatan) agar debitur digolongkan kembali ke dalam kualitas kredit lancar.

Penanganan kredit tersebut pada PT. Bank Rakyat Indonesia mengacu pada pasal 51 PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang restrukturisasi kredit. Dengan berpedoman pada PBI tersebut maka PT. Bank Rakyat Indonesia membuat suatu kebijakan bagi kredit macet dengan diterbitkannya Surat Keputusan DIREKSI PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S.94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember Tentang Restrukturisasi Kredit. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia tersebut bahwasanya SK tersebut merupakan suatu pedoman internal PT. Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang mengalami kredit macet.

Adapun tahap-tahap restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember Tentang Restrukturisasi Kredit adalah dengan :

- a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit
- b. Melakukan negosiasi
- c. Analisis dan Evaluasi
- d. Putusan Restrukturisasi
- e. Dokumentasi Restrukturisasi
- f. Monitoring

Berdasarkan hal di atas, penulis melihat adanya hambatan mengenai tahap proses restrukturisasi kredit tersebut, dapat dilihat bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kawi Malang telah melakukan tahap restrukturisasi kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember Tentang Restrukturisasi Kredit. Sehubungan dengan hal di atas, penulis tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai: ***“RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG KAWI MALANG TERHADAP PERUSAHAAN OTOBUS PUTRA MULIA BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MALANG (STUDI IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN DIREKSI NO:S.94-DIR/ADK/12/2005 TANGGAL 30 DESEMBER 2005 TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT”***

B. RUMUSAN MASALAH

Pembahasan dalam artikel ini, berfokus pada proses restrukturisasi kredit, maka berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang timbul dalam proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang?
2. Apa saja hambatan-hambatan serta upaya penyelesaian hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam proses restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Malang?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan suatu model pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,² dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang proses restrukturisasi kredit. Penelitian ini tentunya mengkaji dan menganalisa terhadap peraturan yang berkaitan dengan pokok bahasan tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap perusahaan otobus Putra Mulia, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S.94 DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Restrukturisasi Kredit Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit. Di dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu,:

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, yaitu hasil wawancara dengan Satuan Kerja Restrukturisasi Kredit bagian Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kawi Malang yang diwakilkan oleh Bapak Nanang Irfani dan Bapak Afriyayadi.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94 –

² Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 (Jakarta : UI, 2007), Hal 52

DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tentang Perubahan Atas Restrukturisasi Kredit Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 Tentang Restrukturisasi Kredit, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan data-data yang diperoleh dari pengkajian terhadap literatur (buku-buku) serta data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO:S. 94-DIR/ADK/12/2005 Tanggal 30 Desember Tentang Restrukturisasi, maka restrukturisasi dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali terhadap debitur. Adapun tahap-tahap restrukturisasi kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia adalah dengan :

a) Prakarsa Restrukturisasi Kredit

Prakarsa restrukturisasi kredit dalam restrukturisasi 1 (satu) maupun restrukturisasi 2 (dua) diawali dengan memanggil debitur dan mengajukan peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisan (surat). Melakukan wawancara dan melakukan analisa ulang atas kondisi keuangan debitur, menanyakan usaha kedepan dan rencana penyelesaian kewajibannya.³

Setelah dilakukan pendekatan berdasarkan uraian prakarsa di atas terhadap pihak debitur, terdapat suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan pemasukan dari tahun sebelumnya. Permasalahan tersebut berdampak pada penurunan pemasukan yang mengakibatkan debitur mengalami kerugian. maka

³ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Retail PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 20 Januari 2013.

bank dalam kondisi seperti ini menawarkan dan memutuskan untuk melakukan penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit kepada debitur.

b) Melakukan negosiasi

Bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur. Proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan bank yaitu:⁴

- 1) Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kepada kreditur atau pihak bank
- 2) Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN)
- 3) Setelah membuat laporan, petugas bank selanjutnya membuat Berita Acara Negosiasi (BAN)
- 4) Barulah melakukan analisis kembali atau disebut juga dengan 5C.

Pada awalnya debitur mengajukan untuk angsuran Kredit Modal Kerja dari Rp. 15.000.000,00 menjadi Rp. 1.000.000,00 tetapi karena menurut pihak bank perbandingan tersebut terlalu jauh, maka bank menawarkan angsuran tersebut menjadi Rp. 5.000.000,00 dan penawaran tersebut disetujui oleh debitur, sedangkan untuk Kredit Investasi yang pada awalnya debitur mengajukan angsuran Kredit Investasi dari Rp 25.000.000,00 per bulan menjadi Rp 1.000.000,00 per bulan, namun pihak bank menolak tawaran negosiasi tersebut dengan alasan oleh karena perbandingan tersebut terlalu jauh maka, sampai pada akhirnya angsuran tersebut disepakati menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan. Dalam restrukturisasi 1 (satu) negosiasi yang terjadi adalah seperti uraian yang ada di atas, di restrukturisasi yang ke 2 hasil negosiasi restrukturisasi tetap digunakan. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tahap negosiasi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dengan pihak perusahaan otobus dapat berjalan.⁵

⁴ Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S.94-DIR/ADK/12/2005 Tentang Restrukturisasi Kredit

⁵ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Retail PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 13 Maret 2013.

c) Analisis dan Evaluasi

Terdapat tiga tahap evaluasi yang kemudian dipilih/ditempuh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap PO. Putra Mulia yaitu melalui upaya:⁶

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit

Berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit Penurunan suku bunga kredit adalah untuk perubahan/penurunan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dari suku bunga yang saat ini sedang berlaku. Berikut merupakan tabel penurunan suku bunga kredit terhadap debitur, yaitu:

Tabel 2.
Penurunan Suku Bunga Kredit

| Perjanjian Kredit | Bunga Awal | Restrukturisasi 1 | Restrukturisasi 2 |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Kredit Modal Kerja | 16% | 14% | 11% |
| Kredit Investasi | 16% | 14% | 11% |

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Pihak bank menerapkan penjadwalan ulang kepada debitur terhadap kredit modal kerja dengan penurunan suku bunga Kredit Modal Kerja yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan dua kali Restrukturisasi Kredit yang intinya melakukan penurunan suku bunga kredit yang semula dengan bunga awal 16% kemudian pada restrukturisasi 1 menjadi 14% per tahun dan pada restrukturisasi 2 diubah menjadi 11% per tahun Kredit investasi dalam hal ini juga dilaksanakan dua kali restrukturisasi Kredit yang intinya juga melakukan penurunan suku bunga yang awalnya 16% pertahun kemudian pada restrukturisasi 1 menjadi 14% per tahun dan restrukturisasi ke 2 diubah menjadi 14% per tahun berlaku secara *floating rate* (mengambang).

2. Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran pokok dan atau bunga/denda.

⁶ Hasil Wawancara dengan Nanang Irfani, Account Officer Kredit Program PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 27 Januari 2013.

Tabel 3.
Perubahan Besarnya Angsuran

| Perjanjian Kredit | Angsuran Awal | Restrukturisasi 1 | Restrukturisasi 2 |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kredit Modal Kerja | 25.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Kredit Investasi | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 |

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

Terhadap kredit debitur ini dilakukan restrukturisasi, hal itu dapat dilihat dari riwayat kredit debitur. Pinjaman yang diberikan kepada debitur pertama kali adalah Kredit Modal Kerja (KMK) pada tanggal 25 Mei 2005 sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu untuk menambah modal kerja renovasi dan perbaikan teknis maka pihak bank memberikan jangka waktu kredit sampai dengan 25 Mei 2006. Kredit Modal Kerja yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan dua kali Restrukturisasi Kredit yang intinya mengubah angsuran pokok pinjaman yang semula Rp. 25.000.000,00 per bulan di restrukturisasi 1 diubah menjadi Rp. 15.000.000,00 per bulan dan di restrukturisasi 2 diubah menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan.

Terhadap Kredit Investasi ini diberikan pada tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan jangka waktu kredit 5 tahun yaitu sampai 15 Juni 2012, untuk Kredit investasi tidak ada perpanjangan jangka waktu hanya merubah limit kredit yang telah diuraikan di atas yaitu jatuh tempo pada tahun 2012. Sedangkan, untuk kredit modal kerja dapat diperpanjang setiap tahunnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Nanang Irfani** PT.Bank Rakyat Indonesia mempunyai kebijakan internalnya sendiri bahwa untuk kredit modal kerja ini dijelaskan fasilitas kredit ini dapat diperpanjang setiap tahunnya tetapi debitur sampai saat ini belum mampu mengangsur kredit tersebut. Kredit Investasi yang dinikmati oleh debitur dilaksanakan dua kali Restrukturisasi Kredit yang intinya mengubah angsuran pokok pinjaman pada restrukturisasi 1 yaitu senilai Rp.25.000.000,00 per bulan diubah menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan.

Hingga pada 15 Januari 2013 jumlah tunggakan hutang pokok dan bunga yang dimiliki oleh debitur yang ada sejak kredit-kreditnya benar-benar dinyatakan macet pada bulan Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Tunggakan Hutang Pokok Dan Bunga PO. Putra Mulia

| Jenis Kredit | Plafond | Baki Debet/ Hutang Pokok | Hutang Bunga |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Modal Kerja | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 28.027.000,00 |
| Investasi | 1.500.000.000,00 | 425.000.000,00 | 38.425.000,00 |
| Jumlah | 1.800.000.000,00 | 725.000.000,00 | 66.452.000,00 |

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2013*

3. Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan pasal 3 ayat (6) Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit bahwa Pengertian asset debitur di sini meliputi asset perusahaan debitur, baik yang dijaminakan maupun yang tidak dijaminakan atau yang dijaminakan kepada pihak ketiga. Pengelolaan dan atau pengambilalihan asset debitur tersebut merupakan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit baik secara aktif maupun pasif (pengawasan).

Restrukturisasi kredit macet terhadap utang debitur telah diupayakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kawi Malang dengan cara pengambilalihan asset milik debitur. Asset milik debitur yaitu berupa 7 buah unit bus (benda bergerak) dan benda tetap. Dalam hal ini Asset benda bergerak yaitu berupa bus milik debitur tetap dioperasikan debitur menjalankan usahanya. Asset tersebut dibebankan dengan jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

Upaya restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap utang debitur yang tergolong ke dalam kualitas kredit macet salah satunya bank meminta kepada debitur untuk menjual asset debitur yang dilakukan oleh debitur sendiri secara sukarela. Namun, asset tersebut tidak berhasil terjual karena sikap debitur yang terus mengindar (tidak kooperatif) ketika pihak bank terus mendesak untuk mengambilalih atau menyerahkan asset tersebut, sehingga dapat disimpulkan upaya pengambilalihan asset debitur gagal atau tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi kredit diatur oleh pihak manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang yaitu MP (Manajer Pemasaran) atau MBM (Manajer Bisnis Mikro), dimana pihak manajemen tersebut mengadakan

kuorum (Komite Kredit) atau diskusi untuk menyelamatkan kredit macet terhadap debitur, lalu di dalam diskusi tersebut pihak manajemen terkait memberikan solusi dan saran yang nantinya dari solusi-solusi tersebut akan menghasilkan satu solusi terbaik dengan pertimbangan berdasarkan hasil kuorum tersebut.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak **Nanang Irfani** Selaku Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang secara garis besar menjelaskan materi putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur yaitu isinya mengubah syarat dan ketentuan kredit antara lain berupa penurunan tingkat suku bunga kredit yaitu Kredit Modal Kerja dari 14% menjadi 11% dan Kredit investasi dari 14% menjadi 11%, pemberian keringanan tunggakan hutang pokok yaitu untuk Kredit Modal Kerja dari Rp 15.000.000,00 per bulan menjadi Rp5.000.000,00 per bulan dan Kredit investasi dari Rp. 25.000.000,00 per bulan menjadi Rp. 5.000.000,00 per bulan, perpanjangan jangka waktu untuk kredit modal kerja perpanjangan waktu selama satu tahun dan kredit investasi selama lima tahun.

Materi restrukturisasi tersebut dibuat dalam bentuk addendum restrukturisasi pertama dan addendum restrukturisasi kedua, oleh karena terhadap debitur tersebut telah terjadi dua kali restrukturisasi yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kredit semula yaitu perjanjian kredit yang tertuang di dalam akta perjanjian kredit tanggal 20 Mei 2005 Nomor 19 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sri Amini Miadji SH Notaris di Malang.

e) Dokumentasi Restrukturisasi

Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit, meliputi:

1) Asli surat permohonan debitur

Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

2) Copy laporan kunjungan kepada nasabah

Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan

⁷ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Retail PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 14 Maret 2013.

kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Petugas membuat laporan kunjungan tersebut dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

3) Copy berita acara negosiasi dengan debitur

Negosiasi merupakan gambaran awal serta persepsi mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur dengan pihak bank, selanjutnya dibuat berita acara negosiasi (BAN).

4) Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) + foto usaha dan agunan

Petugas memeriksa dan menilai agunan milik debitur serta memeriksa prospek usaha debitur, dimana petugas melihat usaha debitur memiliki prospek usaha yang masih cukup baik, selanjutnya dibuat laporan hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.

5) Asli Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit

Bank langsung terjun ke lapangan dan melihat kondisi usaha debitur dengan melakukan pemantauan keuangan dan keadaan keseluruhan usaha maupun kredit debitur, selanjutnya petugas membuat hasil analisis ini ke dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit.

6) Asli CRR Klasifikasi Warna Kredit terakhir (dalam rangka restrukturisasi kredit)

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang berwenang memberikan putusan kredit yang didasarkan pada warna kredit sebagai berikut:

- a) Untuk kredit dengan klasifikasi warna putih diputus oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (*Relationship Management*) yang memiliki limit kredit yang cukup;
- b) Untuk kredit dengan klasifikasi warna abu-abu diputus secara bersama-sama oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (*Relationship Management*) dan Pejabat Kredit Lini bidang CRM (*Credit Risk Management*) yang memiliki limit yang cukup.

- c) Untuk kredit bermasalah, yang berwenang adalah Pejabat Kredit Lini bidang RM (*Relationship Management*) yang ditunjuk atau Pejabat Kredit Lini bidang CRM (*Credit Risk Management*) sesuai dengan limit kredit yang cukup.

f) Monitoring

Monitoring usaha lebih ditingkatkan terhadap debitur, kunjungan ke debitur harus lebih sering dilakukan, omset usaha dan biaya-biaya harus diperketat, laporan keuangan harus tertib, artinya pihak bank harus mengetahui secara detail perkembangan usaha debitur, sehingga secara dini dapat diketahui oleh bank dan tindakan-tindakan pencegahan. Monitoring secara ketat berlangsung 6 bulan sampai 1 tahun selama proses restrukturisasi berjalan. Setelah dilakukan monitoring oleh pihak bank dan diketahui bahwa kondisi debitur memburuk karena beberapa hal yang tidak dapat diperbaiki maka bank mengambil keputusan untuk menjual jaminannya.⁸

Tahap-tahap restrukturisasi PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit. Secara prinsip bank tidak menginginkan usaha debitur berhenti (*stop*), karena otomatis akan mematikan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Oleh karena dalam hal ini debitur dalam kolektibilitas kredit macet maka pihak bank mengambil tindakan yang tidak terlalu menyulitkan debitur, justru sebaliknya pihak bank akan melihat prospek usaha debitur.

Hambatan yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Proses Restrukturisasi Kredit Terhadap PO. Bus Putra Mulia

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia NO: S. 94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005

⁸ Hasil Wawancara dengan Afriyayadi Yunanta, Account Officer Kredit Retail PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 15 Maret 2013.

Tentang Restrukturisasi Kredit, juga terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut:⁹

1. Prakarsa Kredit mengalami kendala dimana debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat prakarsa restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank, yaitu ketika bank melakukan pemanggilan terhadap debitur dan mengajukan peringatan/pemberitahuan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisan (surat)/surat pernyataan yang dibuat oleh pihak bank yang menyatakan bahwa kondisi debitur dalam memenuhi kewajibannya sedang bermasalah yaitu dalam kolektibilitas kredit macet. Dalam tahap ini, bahwa debitur tidak beritikad baik dapat dilihat dari debitur tidak mau memenuhi panggilan pihak bank apabila pihak bank memanggil debitur.
2. Negosiasi mengalami kendala dimana debitur tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan dari debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan antagonistik yang ditunjukkan oleh debitur pada saat proses negosiasi. Pada sisi yang lain pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal pada saat proses negosiasi, sementara pihak bank mencoba mencapai solusi negosiasi yang paling baik agar tidak merugikan pihak bank maupun pihak debitur itu sendiri, negosiasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jenis restrukturisasi, syarat, dan *type* kredit, namun debitur tetap menunjukkan sikap yang tidak kooperatif.
3. Analisa dan evaluasi mengalami kendala dimana bank kesulitan dalam melakukan pendekatan analisa dan evaluasi kepada debitur karena sikap debitur yang tidak kooperatif tersebut, diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar.
4. Putusan Restrukturisasi mengalami kendala, dimana putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dan debitur yang tertuang di

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Bani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 16 Maret 2013.

dalam Surat Putusan Restrukturisasi Kanwil tidak dijalankan oleh debitur sesuai dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran bulanan terhadap debitur yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan dari debitur, pada sisi lain putusan restrukturisasi tersebut sebenarnya membantu dalam hal untuk menyelamatkan kredit macet yang diderita debitur.

5. Dokumentasi Restrukturisasi mengalami kendala pada saat dokumen-dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi kredit telah terpenuhi oleh debitur dan harus dilengkapi sesuai data sebenarnya, tetapi kemudian setelah melalui proses analisis perbankan kembali oleh pihak bank diketahui bahwa data-data yang ada dalam dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dipaparkan oleh debitur di dalam dokumentasi restrukturisasi tersebut. Bank tentu saja kesulitan untuk hal semacam ini yang pada akhirnya mengacaukan isi dari dokumentasi restrukturisasi tersebut karena tidak sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada pada debitur, berarti restrukturisasi kredit tidak didukung dengan informasi dokumen lengkap mengenai usaha debitur.
6. Monitoring, dalam hal ini proses monitoring mengalami kendala dimana seperti yang telah diketahui peran dan bimbingan pihak bank dalam hal ini sangat penting untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan restrukturisasi. Tetapi bank kesulitan untuk dapat benar-benar memonitor usaha maupun kondisi keuangan debitur secara detail dan langsung, karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator dan secara fakta bank juga tidak mempunyai kekuatan memaksa.

Upaya Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Dalam Proses Restrukturisasi Kredit Terhadap PO. Bus Putra Mulia

Berikut ini adalah analisis penulis tentang upaya yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang timbul dalam proses restrukturisasi kredit terhadap Perusahaan Otobus Bus Putra Mulia :¹⁰

1. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap prakarsa kredit yaitu pihak bank tidak hanya melakukan pendekatan terhadap debitur saja melainkan juga melakukan pendekatan kepada pihak keluarga atau relasi debitur, dengan tujuan agar debitur lebih terbuka dan dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya. Dalam hal ini, tetap dilakukannya tindakan aktif dari pihak bank untuk menemui debitur. Tetapi diperlukan adanya itikad baik secara berkesinambungan dari masing-masing pihak baik debitur maupun pihak bank itu sendiri dan komunikasi serta kerjasama yang intens. Sehingga penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat diberikan jalan keluar yang baik.
2. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Negosiasi, yaitu dalam negosiasi pihak bank tetap bersikukuh untuk tidak mengikuti permintaan dari debitur yaitu keringanan yang maksimal. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya penerapan negosiasi untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi ini sangat tergantung pada kondisi obyektif pihak bank dan debitur, berarti dalam hal ini antara bank dan debitur harus mengupayakan negosiasi yang sifatnya “series” atau berkelanjutan sampai pada negosiasi tersebut telah mencapai hasil yang maksimal bagi kedua belah pihak dan setiap laporan hasil negosiasi tersebut harus dituangkan ke dalam Berita Acara Negosiasi (BAN) yang dibuat oleh petugas bank.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Analisa dan Evaluasi.
Upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan cara dalam hal ini bank berdasarkan atas prinsip kepercayaan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan kredit karena debitur tersebut memiliki prospek usaha/ kemampuan membayar kembali setelah kredit direstrukturisasi. Dapat disimpulkan bahwa Bank tetap berpegang pada analisa terhadap debitur.
4. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Putusan Restrukturisasi
Untuk keperluan pengawasan putusan restrukturisasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Kanwil dapat terlaksana dengan baik, maka pejabat pemberi pejabat ADK (Administrasi Kredit) wajib melakukan pemeriksaan/ penilaian secara sampling terhadap putusan restrukturisasi dari pejabat yang diberi ADK

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Bani, Account Officer Kredit Bermasalah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kawi Malang tanggal 16 Maret 2013.

(Administrasi Kredit), guna memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan yang ada.

5. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Dokumentasi Restrukturisasi yaitu meminta keterangan mengenai keberadaan dokumen yang dapat berpengaruh terhadap pembayaran hutang debitur tersebut. Dokumentasi merupakan alat pembuktian, maka dalam tahap pendokumentasian bank wajib melaksanakan dokumentasi kredit dengan baik dan tertib. Setiap dokumen yang ada harus dipastikan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen, baik yang ditertibkan oleh bank atau yang disampaikan oleh debitur. Dokumen-dokumen primer kredit seperti surat hutang/perjanjian kredit, asli surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya telah ada dalam berkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumentasi restrukturisasi kredit dan dokumen-dokumen tersebut harus benar, lengkap serta sempurna secara hukum agar proses restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksana dengan baik;
6. Upaya mengatasi hambatan dalam tahap Monitoring, yaitu pihak bank mengupayakan agar pengawasan terhadap debitur kredit macet tersebut dengan bantuan pihak ketiga yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memonitor debitur yang proses pengawasan dan penagihannya dimintakan bantuan kepada Kejaksaan Negeri Malang, maka pihak bank membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan Negeri Malang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan dapat mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum, termasuk masalah hukum yang timbul dari hubungan pemberian kredit antara bank dengan debitur bilamana debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada bank.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses restrukturisasi kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia berkedudukan di Kabupaten Malang:

1) PT. Bank Rakyat Indonesia Rakyat (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang mempunyai fasilitas dalam melayani masyarakat yang salah satunya adalah pemberian pinjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit ini nasabah yang difokuskan adalah seorang debitur yang memiliki usaha perusahaan otobus Putra Mulia berkedudukan di Malang. Pemberian kredit terhadap debitur tersebut ternyata tidak terlepas dari kredit bermasalah yang tergolong sebagai kolektibilitas kredit macet. Dalam menangani permasalahan tersebut pihak bank melakukan penanganan dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi atau *Restructuring* (penyelamatan) adalah suatu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

2) Pelaksanaan restrukturisasi kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Kawi Malang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap debitur. Sesuai prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NO: S.94-DIR/ADK/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Restrukturisasi Kredit yaitu baik restrukturisasi pertama dan restrukturisasi kedua meliputi Tahap-tahap Restrukturisasi Kredit:

- 1) Prakarsa Restrukturisasi Kredit
- 2) Melakukan negosiasi
- 3) Analisis dan Evaluasi
- 4) Putusan Restrukturisasi
- 5) Dokumentasi Restrukturisasi
- 6) Monitoring

Dari tahapan tersebut materi yang direstrukturisasi yaitu:

- 1) Perubahan tingkat suku bunga kredit
- 2) Penjadwalan Kembali
- 3) Pengelolaan/pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku

b. Hambatan yang dihadapi dalam Proses Restrukturisasi Kredit terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang antara lain adalah:

- 1) Prakarsa Kredit, yaitu debitur sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat prakarsa restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank yaitu pada saat melakukan pemanggilan terhadap debitur.
 - 2) Negosiasi, yaitu pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal pada saat proses negosiasi.
 - 3) Analisis dan Evaluasi, yaitu diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar
 - 4) Putusan Restrukturisasi, yaitu Putusan Restrukturisasi tidak dijalankan oleh debitur sesuai dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati yaitu seperti kewajiban angsuran bulanan terhadap debitur yang telah direstrukturisasi tidak dibayarkan.
 - 5) Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu pada saat dokumen-dokumen yang ada dalam paket restrukturisasi kredit telah terpenuhi oleh debitur dan harus dilengkapi sesuai data sebenarnya, tetapi kemudian setelah melalui proses analisis perbankan kembali oleh pihak bank diketahui bahwa data-data yang ada dalam dokumentasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau sebenarnya yang telah dipaparkan oleh debitur.
 - 6) Monitoring, yaitu karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator.
- c. Upaya untuk menanggulangi hambatan dalam restrukturisasi kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia antara lain adalah:
- 1) Prakarsa Kredit, yaitu dalam hal ini, pihak bank tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya dengan tetap dilakukannya tindakan aktif dari pihak bank untuk menemui debitur.
 - 2) Negosiasi, yaitu pihak bank tetap bersikukuh untuk tidak mengikuti permintaan dari debitur yaitu keringanan yang maksimal.

- 3) Analisis dan Evaluasi, dengan cara dalam hal ini bank berdasarkan atas prinsip kepercayaan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan kredit.
- 4) Putusan Restrukturisasi, yaitu pejabat pemberi pejabat ADK (Administrasi Kredit) wajib melakukan pemeriksaan/ penilaian, guna memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan yang ada.
- 5) Dokumentasi Restrukturisasi, yaitu meminta keterangan mengenai keberadaan dokumen yang dapat berpengaruh terhadap pembayaran hutang debitur tersebut.
- 6) Monitoring, yaitu dalam hal ini pihak bank mengupayakan agar pengawasan terhadap debitur kredit macet tersebut dengan meminta bantuan pihak ketiga kepada Kejaksaan Negeri Malang berdasarkan pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

2. Saran

- a. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang
 - 1) Memonitor dengan baik pemenuhan oleh debitur atas semua persyaratan-persyaratan pemberian kredit yang telah disepakati bersama antara debitur dengan bank.
 - 2) Memonitor perkembangan usaha dan keuangan nasabah termasuk kemampuan *cash flow* dan pemenuhan kewajiban debitur kepada pihak lain, selain bank (misalnya supplier, langganan dan sebagainya)
 - 3) Agar proses restrukturisasi dapat berjalan efektif seharusnya dengan melakukan penilaian lebih dalam terhadap karakter dan prospek usaha dilanjutkan dengan penilaian keuangan dan jaminan debitur
- b. Bagi PO. Putra Mulia Yang Berkedudukan di Kabupaten Malang
 - 1) Sebaiknya debitur benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi (restrukturisasi kedua) untuk satu hutang dari debitur yang sama.
 - 2) Debitur harus bertindak secara profesional pada saat pelaksanaan restrukturisasi kredit, sehingga pihak bank tidak dirugikan. Dalam hal ini, pihak bank juga tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya. Tetapi diperlukan adanya itikad baik secara berkesinambungan dari debitur dan komunikasi serta kerjasama yang

intens. Sehingga penyebab permasalahan dapat diketahui dan dapat diberikan jalan keluar yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. PT. Refika Aditama.

Salim HS. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. PT. Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Universitas Indonesia.

PERUNDANG – UNDANGAN

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/Kep/Dir tanggal 12 November 1998 tentang **restrukturisasi kredit** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 pada tanggal 12 Juni 2000

berdasarkan Surat Keputusan Bank Rakyat Indonesia NOKEP: S. 94-DIR/ADK/12/2005 Tentang **Restrukturisasi Kredit**